

Nama :	Tanggal :
Kelas : X	Mapel : PKN

1. Dalam undang undang terdapat beberapa alinea yaitu...
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. 5
2. Di dalam pembukaan UUD 1945 tercantum bahwa kemerdekaan itu ialah hak ..
- A. Suatu Negara
  - B. Suatu Bangsa
  - C. Setiap Bangsa
  - D. Setiap Negara
  - E. Bangsa Indonesia
3. Menurut pembukaan UUD 1945 alinea pertama, penjajahan bertentangan dengan sila ke ...
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. 5
4. Kemerdekaan Indonesia dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke ...
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. 5
5. Suatu negara menjajah negara lain dan negara yang dijajah tidak berkembang disebut ...
- A. Komunisme
  - B. Imperialisme
  - C. Diskriminasi
  - D. Kolonialisme
  - E. Liberalisme
6. Dibawah ini makna yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945, kecuali ...
- A. Motivasi
  - B. Dasar Perjuangan
  - C. Pembenaran Perjuangan
  - D. Makna Kemerdekaan
  - E. Sistem pemerintahan

7. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke ...
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. 5
8. Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan melainkan dalam pengertian pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, disebabkan...
- a. Di Indonesia mengutamakan prinsip saling mengawasi antar lembaga
  - b. Di Indonesia lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan antar lembaga
  - c. Ketiga lembaga kekuasaan terdapat hubungan yang bersifat kerjasama
  - d. Kekuasaan eksekutif harus tunduk pada kekuasaan legislatif
  - e. Ketiga macam kekuasaan itu berada dalam pengawasan MPR
9. Sistem pembagian kekuasaan Trias Politika merupakan ajaran dari...
- a. John Lokce
  - b. Montesqueieu
  - c. Abraham Lincoln
  - d. F.D Rosevelt
  - e. Aristoteles
10. Berikut cita-cita Bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 ...
- A. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur
  - B. Bersatu, berdaulat, aman dan damai
  - C. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  - D. Bersatu, berdaulat, adil dan tentram
  - E. Memajukan kesejahteraan umum
11. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ....
- A. kekuasaan koordinatif
  - B. kekuasaan federatif
  - C. kekuasaan legislatif
  - D. kekuasaan eksekutif
  - E. kekuasaan yudikatif
12. Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan kedaulatan...
- A. Ke dalam
  - B. Ke luar
  - C. Negara

D. Mutlak

E. Tertinggi

13. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ialah...

A. Eksaminatif

B. Moneter

C. Konstitutif

D. Legislatif

E. Yudikatif

14. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu kekuasaan...

a. Konstitutif

b. Eksekutif

c. Legislaif

d. Fiskal

e. Eksaminatif

15. Salah satu lembaga negara yang bertugas memeriksa keuangan negara adalah...

a. Mahkamah Agung

b. Dewan perwakilan Rakyat

c. Komisi Yudisial

d. Badan Pemeriksa Keuangan

e. Komisi pemberantasan korupsi

16. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang terdiri atas wakil-wakil daerah Provinsi yang dipilih langsung oleh...

a. MPR

b. Presiden

c. DPR

d. Rakyat

e. Golongan

17. Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ...

A. Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi

B. Gubernur dan Wakil Gubernur

C. Gubernur dan Sekretariat Daerah

D. Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah

E. Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah

18. Berikut ini yang dimaksud kekuasaan yudikatif adalah..

- A. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang
- B. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- C. Kekuasaan untuk mengawasi jalannya peraturan undang - undang
- D. Kekuasaan untuk mengangkat duta dan konsul
- E. Kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional

19. Unsur konstitutif terbentuknya negara adalah...

- A. Rakyat, tentara, dan pemerintahan yang berdaulat
- B. Wilayah, tentara dan pemerintah yang berdaulat
- C. Rakyat, wilayah, dan pengakuan dari dunia internasional
- D. Rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internasional
- E. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat

20. Menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara merupakan bagian dari..

- A. Kekuasaan eksaminatif
- B. Kekuasaan moneter
- C. Kekuasaan fiskal
- D. Kekuasaan legislatif
- E. Kekuasaan konstitutif

21. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
- B. Legislatif
- C. Eksekutif
- D. Yudikatif
- E. Eksaminatif

22. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
- B. Legislatif
- C. Federatif
- D. Yudikatif
- E. Eksaminatif

23. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

- A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
- B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

- C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
- D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
- E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

24. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
- B. Legislatif
- C. Federatif
- D. Yudikatif
- E. Eksaminatif

25. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ...

- A. Menteri Keuangan RI
- B. Dewan Perwakilan Daerah
- C. Dewan Perwakilan Rakyat
- D. Gubernur Bank Indonesia
- E. Badan Pemeriksa Keuangan

26. Berikut yang *bukan* termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah...

- a. Menghormati HAM
- b. Menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan bersih dan berwibawa
- c. Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi
- d. Mengembangkan sikap hidup bergotong royong
- e. Tidak mengikuti upacara bendera dengan khidmat

27. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berfungsi sebagai petunjuk dalam...

- a. Kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara
- b. Menjalankan semua aktifitas kehidupan ritual keagamaan
- c. Melaksanakan setiap kegiatan sosial politik kemasyarakatan
- d. Menata kehidupan pribadi setiap warga negara
- e. Menyelenggarakan tata kehidupan pemerintahan negara.

28. Berikut yang bukan pengertian Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh adalah...

- a. Sila-sila Pancasila saling berkaitan
- b. Sila yang satu tidak lebih menonjol peranannya dibanding sila yang lain
- c. Masing-masing sila boleh terlepas dari sila yang lain

- d. Pancasila harus dilaksanakan dan diamankan secara bulat dan utuh  
e. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
29. Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan dengan jelas disebutkan dalam UUD Negara RI 1945, dibawah ini yang kekuasaan presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah...
- a. Mengangkat dan memberhentikan para Menteri
  - b. Mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari negara lain
  - c. Memberikan tanda jasa dan lain-lain tanda
  - d. Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat, laut dan Udara
  - e. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
30. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ....
- A. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang
  - B. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
  - C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
  - D. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
  - E. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa
31. Apa bentuk sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia?
- a. Monarki
  - b. Republik
  - c. Federasi
  - d. Oligarki
32. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh siapa?
- a. Presiden
  - b. DPR
  - c. MPR
  - d. Mahkamah Agung
33. Siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang di Indonesia?
- a. Presiden
  - b. DPR
  - c. MPR
  - d. Mahkamah Konstitusi
34. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga berikut, kecuali:
- a. Mahkamah Agung
  - b. Mahkamah Konstitusi
  - c. Komisi Yudisial
  - d. Dewan Perwakilan Daerah

35. Apa fungsi utama dari lembaga legislatif di Indonesia?

- a. Melaksanakan hukum
- b. Membuat undang-undang
- c. Menyusun anggaran
- d. Menyelesaikan sengketa hukum

36. Presiden di Indonesia dipilih melalui:

- a. Pemilihan umum
- b. Penunjukan oleh DPR
- c. Pemilihan oleh MPR
- d. Warisan

37. Apa yang dimaksud dengan sistem checks and balances dalam pemerintahan Indonesia?

- a. Pembagian kekuasaan secara vertikal
- b. Pembagian kekuasaan secara horizontal
- c. Pemusatkan kekuasaan pada satu lembaga
- d. Pemeriksaan dan pengendalian antar lembaga negara

38. Lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah adalah:

- a. Presiden
- b. DPR
- c. Mahkamah Agung
- d. BPK

39. Siapa yang bertugas menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Indonesia?

- a. DPR
- b. Presiden
- c. MPR
- d. DPD

40. Kekuasaan yudikatif di Indonesia berfungsi untuk:

- a. Melaksanakan hukum
- b. Membuat kebijakan
- c. Mengawasi pemerintahan
- d. Mengadili pelanggaran hukum